

**Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kudus****Ana Tri Jayanti<sup>1\*</sup>, Rediana Setiyani<sup>2</sup>**<sup>1,2</sup>Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

DOI: 10.15294/baej.v3i2.62304

**Info Artikel****Sejarah Artikel:**

Diterima, 30 Juli 2022

Disetujui, 2 Agustus 2022

Dipublikasikan, 31 Agustus 2022

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa baik secara simultan maupun parsial. Populasi penelitian ini adalah pengelola keuangan desa pada pemerintah desa di Kabupaten Kudus sejumlah 123 desa. Sampel pada penelitian ini sejumlah 34 desa dengan teknik slovin. Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

**Keywords:**

*Accessibility of Financial Statement; Accountability of The Village Financial Management; Competence; Internal Control System; Presentation of Financial Statement;*

**Abstract**

*The purpose of this study was to examine the effect of financial statement presentation, financial statement accessibility, internal control system, and competence on village financial management accountability either simultaneously or partially. The population of this study is the village financial manager at the village government in Kudus Regency, with a total of 123 villages. The sample in this study was 34 villages using the slovin technique. Methods of data collection by using a questionnaire. The data analysis technique used descriptive analysis and multiple linear regression analysis. The results showed that the simultaneous and partial presentation of financial statements, accessibility of financial statements, internal control systems, and competence had a positive effect on village financial management accountability.*

## PENDAHULUAN

Pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Sumber keuangan desa dapat berasal dari: (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa), (3) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, (4) Alokasi Dana Desa, (5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Kabupaten/Kota, (6) Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan (7) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah (UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib untuk menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa (BPKP, 2015).

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran alokasi anggaran yang

peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana Transfer Daerah secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa dituntut harus mampu memberikan laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kepala Desa menjadi penanggung jawab pengelolaan keuangan dan aset desa. PP No. 43 Tahun 2014 pasal 103-104 tentang Tata Cara Pelaporan, menyatakan bahwa Kepala Desa diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa juga diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang dibuat oleh Kepala Desa ditujukan kepada Bupati/Walikota yang disampaikan melalui Camat.

Pengelolaan keuangan desa harus mengandung prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh entitas baik entitas bisnis maupun pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Akuntabilitas bagi pemerintah dinilai sangat penting untuk dimiliki disebabkan adanya akuntabilitas tersebut

akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas yang telah dilakukan oleh pemerintah. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Penelitian Hanifah & Kiswanto (2017) bahwa pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam pengungkapan dan penyajian berbagai informasi tentang anggaran dan keuangan. Untuk mewujudkan hal tersebut dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik. Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah. Menurut Bastian (2006) sebagaimana dirujuk Riyansa, dkk (2015) terdapat empat karakteristik laporan keuangan kualitatif pokok yaitu : relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Penyajian laporan keuangan merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pemerintah desa harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan, maka akan memperjelas pelaporan keuangan karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan, sehingga akan berimplikasi ter-

hadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sesuai dengan teori agensi Jensen & Meckling (1976) bahwa pemerintah desa sebagai agen melaksanakan tugas dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan berupa relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Temuan Fauziyah & Handayani (2017) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, temuan Wahyuni et al., (2014) bahwa secara simultan dan parsial penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bandung.

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengakses laporan keuangan. Pemerintah perlu mengakses laporan keuangan yang dibuatnya agar masyarakat dengan mudah memperoleh laporan keuangan tersebut. Dengan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan maka publik (badan pemeriksa, masyarakat maupun investor) dapat mengontrol pertanggungjawaban penggunaan aset dan kebijakan keuangan yang diambil oleh pemerintah. Adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Temuan Fauziyah & Handayani (2017) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu temuan

Wahyuni et al., (2014) bahwa secara simultan dan parsial aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bandung.

Selain itu factor lain yang diduga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah system pengendalian internal. Hal ini sesuai dengan temuan Nugraha (2011) bahwa sistem pengendalian intern secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas aset tetap di pemerintah Kota Cimahi. Aramide & Bashir (2015) juga menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan di pemerintah daerah di Nigeria.

Keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam sebuah pemerintahan didukung oleh kompetensi para perangkat yang ada di pemerintah. Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Pada konteks manajemen Sumber Daya Manusia, istilah kompetensi mengacu kepada karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya. Kompetensi yang dimiliki pemerintah desa bertujuan supaya pelayanan pengelolaan keuangan desa bisa sesuai dengan peraturan desa yang ada. Hal ini sesuai dengan temuan Iskandar & Setiyawati (2015) bahwa kompetensi akuntan internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa baik secara simultan maupun parsial.

## **METODE**

Penelitian kuantitatif ini berlokasi di Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Populasi adalah pengelola keuangan pada pemerintah desa di Kabupaten Kudus sejumlah 123 desa. Jumlah sampel ditentukan dengan rumus slovin dan diperoleh yaitu 34 desa. Data dikumpulkan dengan kuesioner. Data dianalisis dengan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil analisis deskriptif Penyajian laporan keuangan (PLK) bahwa nilai tertinggi adalah 70 dan nilai terendah 51 dengan rata-rata sebesar 62,15 atau berada pada kategori sangat baik. Indikator penyajian laporan keuangan meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami. Hanya satu indikator yang memiliki kriteria baik yaitu dapat dibandingkan, sedangkan untuk indikator lainnya memiliki kriteria sangat baik.

Hasil analisis deskriptif Aksesibilitas laporan keuangan (ALK) bahwa nilai tertinggi adalah 35 dan nilai terendah 27 dengan rata-rata sebesar 31,82 atau berada pada kategori sangat baik. Indikator aksesibilitas laporan keuangan meliputi terbuka dimedia massa, mudah diakses, ketersediaan informasi. Semua indikator aksesibilitas laporan keuangan memiliki kriteria baik

Hasil analisis deskriptif Sistem pengendalian internal (SPI) bahwa nilai tertinggi adalah 90 dan nilai terendah 65 dengan rata-rata sebesar 78,6 atau berada pada kategori sangat baik .

Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

**Tabel 1.** Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	Mean	Kriteria
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	69,6	Sangat Baik
Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum	23,32	Sangat Baik
Akuntabilitas Proses	13,89	Sangat Baik
Akuntabilitas Program	18,42	Sangat Baik
Akuntabilitas Kebijakan	13,97	Sangat Baik
Penyajian Laporan Keuangan	62,15	Sangat Baik
Relevan	26,23	Sangat Baik
Andal	13,56	Sangat Baik
Dapat dibandingkan	8,96	Baik
Dapat dipahami	13,4	Sangat Baik
Aksesibilitas Laporan Keuangan	31,82	Sangat Baik
Terbuka dimedia massa	9,08	Baik
Mudah diakses	9,25	Baik
Ketersediaan informasi	13,49	Baik
Sistem Pengendalian Internal	78,6	Sangat Baik
Lingkungan pengendalian	13,13	Baik
Penilaian resiko	17,31	Baik
Kegiatan pengendalian	22,21	Baik
Informasi dan komunikasi	13,22	Sangat Baik
Pemanfaatan pengendalian intern	12,76	Baik
Kompetensi	39,82	Sangat Baik
Keterampilan	9,05	Baik
Pengetahuan	17,59	Baik
Sikap kerja	13,18	Baik

Sumber : data diolah

Hasil analisis deskriptif Kompetensi (K) bahwa nilai tertinggi adalah 45 dan nilai terendah 33 dengan rata-rata sebesar 39,82 atau berada pada kategori sangat baik. Indikator sistem pengendalian internal meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian,

informasi dan komunikasi, pemanfaatan pengendalian intern. Indikator informasi dan komunikasi memiliki kriteria sangat baik, sedangkan untuk indikator lainnya memiliki kriteria baik.

Hasil analisis deskriptif Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (APK) bahwa nilai tertinggi adalah 75 dan nilai terendah

nilai terendah 60 dengan rata-rata sebesar 69,6 atau berada pada kategori sangat baik. Indikator kompetensi meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja. Semua indikator kompetensi memiliki kriteria baik. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk melihat

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil persamaan struktural analisis regresi yang didapat dengan menggunakan bantuan IBM SPSS *Statistics* 23 menghasilkan koefisien regresi.

**Tabel 2.** Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Coefficients <sup>a</sup>									
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Correlations			
	B	Std. Error				Zero-order	Partial	Part	
	(Constant)	6,300	5,121	1,230	,221				
1	PLK	,224	,095	,186	2,347	,020	,619	,201	,131
	ALK	,412	,196	,154	2,105	,037	,559	,181	,118
	SPI	,282	,074	,344	3,837	,000	,708	,318	,214
	K	,354	,126	,227	2,808	,006	,642	,238	,157

a. Dependent Variable: APK

Sumber : data diolah

Hasil persamaan regresi Tabel 2 diperoleh persamaan:

$$APK = 6,300 + 0,224 PLK + 0,412 ALK + 0,282 SPI + 0,354 K + e$$

Persamaan ini menunjukkan arti bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel penyajian laporan keuangan, maka akan mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0,224 dengan asumsi aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi tetap. Jika setiap kenaikan satu satuan variabel aksesibilitas laporan keuangan, maka akan mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0,412 dengan asumsi penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi tetap. Setiap kenaikan satu satuan variabel sistem pengendalian internal maka akan mendorong peningkatan akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa sebesar 0,282 dengan asumsi penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan kompetensi tetap. Jika jika setiap kenaikan satu satuan variabel kompetensi, maka akan mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0,354 dengan asumsi variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal tetap.

Uji hipotesis dengan uji simultan (uji F) pada penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3.** Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2410,203	4	602,551	47,256	,000 <sup>b</sup>
	Residual	1670,356	131	12,751		
	Total	4080,559	135			

a. Dependent Variable: APK  
b. Predictors: (Constant), K, ALK, PLK, SPI

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel 3, F hitung sebesar 47,256 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Uji hipotesis dengan uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t pada model regresi dilihat dari tabel 2, diperoleh nilai signifikansi penyajian laporan keuangan  $0,020 < 0,05$ . Artinya penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sehingga  $H_1$  diterima. Pada variabel aksesibilitas laporan keuangan diperoleh nilai signifikansi  $0,037 < 0,05$ .

Artinya aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sehingga  $H_2$  diterima.

Nilai signifikansi sistem pengendalian internal sebesar  $0,000 < 0,05$ . Artinya sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sehingga  $H_3$  diterima. Pada variabel kompetensi diperoleh nilai signifikansi  $0,006 < 0,05$ . Artinya kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sehingga  $H_4$  diterima.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel variabel dependen. Koefisien determinasi dilakukan dengan dua cara, yaitu koefisien determinasi secara simultan dan parsial. Koefisien determinasi secara simultan dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4.** Hasil Koefisien Determinasi secara Simultan

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,769 <sup>a</sup>	,591	,578	3,57083

a. Predictors: (Constant), K, ALK, PLK, SPI

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel 4 nilai adjusted R<sup>2</sup> pada tabel model summary sebesar 0,578, hal ini berarti 57,8% variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dijelaskan oleh empat variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi. Sedangkan sisanya (100% - 57,8% = 42,2%) akan dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Selain koefisien determinasi secara simultan juga ada uji koefisien determinasi secara parsial. Koefisien determinasi secara parsial dapat dilihat pada tabel 3. Berdasarkan tabel 10 dapat dijelaskan bahwa besarnya pengaruh variabel penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada kolom *correlations* nilai parsial  $(0,201)^2 \times 100\% = 4,04\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel penyajian laporan keuangan mempengaruhi variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 4,04%, dengan asumsi jika variabel aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi itu tetap.

Besarnya pengaruh variabel aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada kolom *correlations* nilai parsial  $(0,181)^2 \times 100\% = 3,28\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel aksesibilitas laporan keuangan mempengaruhi variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 3,28%, dengan asumsi jika variabel penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi dianggap tetap. Besarnya pengaruh variabel sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada kolom *correlations* nilai

parsial  $(0,318)^2 \times 100\% = 10,11\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel sistem pengendalian internal mempengaruhi variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 10,11% dengan asumsi jika variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan kompetensi dianggap tetap.

Besarnya pengaruh variabel kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada kolom *correlations* nilai parsial  $(0,238)^2 \times 100\% = 5,66\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel kompetensi mempengaruhi variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 5,66%, dengan asumsi jika variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal dianggap tetap.

### **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti bahwa jika semakin baik penyajian laporan keuangan yang ada pada desa, maka akan meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa itu sendiri. Sebaliknya, jika semakin buruk penyajian laporan keuangan yang ada pada desa maka akan menurunkan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hasil analisis deskriptif akan menunjukkan rata-rata penyajian laporan keuangan desa di Kabupaten Kudus termasuk dalam kriteria sangat baik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah desa di Kabupaten Kudus dalam menyajikan laporan keuangan kepada masyarakat sangat baik.

Adanya penyajian laporan keuangan yang sangat baik maka akan berdampak pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik pula, pemerintah desa akan lebih bertanggungjawab dalam mengelola keuangan desa.

Variabel penyajian laporan keuangan diukur dalam 4 indikator yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dari keempat indikator tersebut hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa hanya satu indikator yang mendapatkan kriteria baik, yaitu indikator dapat dibandingkan. Sedangkan untuk indikator lainnya yaitu relevan, andal, dan dapat dipahami mendapat kriteria yang sangat baik. Dengan demikian penyajian laporan keuangan memiliki peranan dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kudus.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keagenan (*agency theory*) oleh Jensen & Meckling (1976) dimana ada hubungan antara pemerintah desa sebagai agen dengan masyarakat sebagai *principal*. Pemerintah desa melaksanakan tugas dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan berupa relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Wiyana dan Syah (2016), Wahyuni dkk (2016), dan Fauziyah dan Handayani (2017) bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Semakin baik pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.

## **Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti bahwa jika semakin baik aksesibilitas laporan keuangan maka akan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Analisis deskriptif variabel aksesibilitas laporan keuangan rata-rata dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa di Kabupaten Kudus telah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi laporan keuangan desa. Adanya aksesibilitas laporan keuangan yang sangat baik maka pemerintah desa di Kabupaten Kudus telah bertanggungjawab dalam mengelola keuangan desa.

Aksesibilitas laporan keuangan diukur dengan tiga indikator terbuka dimedia massa, mudah diakses, dan ketersediaan informasi. Hasil deskriptif per indikator menunjukkan bahwa ketiga indikator dari variabel aksesibilitas laporan keuangan dalam kriteria baik. Dengan demikian aksesibilitas laporan keuangan memiliki peranan juga dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kudus.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keagenan (*agency theory*) oleh Jensen & Meckling (1976) dimana ada hubungan antara pemerintah desa sebagai agen dengan masyarakat sebagai *principal*. Bentuk lain pertanggungjawaban pemerintah desa (*agen*) kepada masyarakat (*principal*) yaitu dengan aksesibilitas laporan keuangan, yaitu dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat (*principal*) dalam mengakses

laporan keuangan pemerintahan desa, sehingga tercapai pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Yusrianti dkk (2013), Wiyana dan Syah (2016), dan Miftahul dan Handayani (2017) bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Semakin baik aksesibilitas laporan keuangan, maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan. Apabila pemerintah mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan, maka aksesibilitas laporan keuangan tersebut dikatakan baik.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti bahwa jika semakin baik sistem pengendalian internal maka akan meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sebaliknya, semakin buruk sistem pengendalian internal maka akan menurunkan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hasil analisis deskriptif variabel sistem pengendalian internal, rata-rata sistem pengendalian internal termasuk dalam kriteria sangat baik. Hal ini berarti bahwa pemerintah desa di Kabupaten Kudus mempunyai sistem pengendalian internal yang baik dalam mengelola keuangan desa. Adanya sistem pengendalian internal yang baik maka pemerintah desa di Kabupaten Kudus telah bertanggungjawab dalam mengelola keuangan desa.

Sistem pengendalian internal diukur dengan lima indikator yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian internal. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa hanya satu indikator variabel sistem pengendalian internal yang mendapat kriteria sangat baik yaitu indikator informasi dan komunikasi. Sedangkan untuk indikator lainnya yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan pengendalian intern termasuk dalam kategori baik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keagenan (*agency theory*) oleh Jensen & Meckling (1976) dimana ada hubungan antara pemerintah desa sebagai agen dengan masyarakat sebagai *principal*. Laporan keuangan yang akuntabel dan transparan dapat terwujud yaitu dengan adanya pengendalian terhadap pembuatan laporan keuangan. Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, pemerintah dapat memakai semua kemampuan dan keahlian dalam melakukan pengendalian internal terhadap laporan keuangan pemerintah desa yang berkualitas.

Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Nugraha (2011) dan Aramide dan Bashir (2015) bahwa sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Semakin baik sistem pengendalian internal yang ada dalam pemerintahan maka akan meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Dengan demikian, dalam pengelolaan keuangan diperlukan adanya sistem pengendalian internal untuk menjaga semua aset yang ada di pemerintahan.

## Pengaruh Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti jika semakin baik kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa maka akan meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kudus.

Hasil analisis deskriptif responden menjelaskan bahwa perangkat desa mayoritas masih dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat, sehingga kemampuan dalam mengelola keuangan masih sangat kurang. Sedangkan untuk analisis statistik variabel kompetensi, rata-rata kompetensi termasuk dalam kategori baik. Dapat dikatakan bahwa pemerintah desa di Kabupaten Kudus memiliki kompetensi yang baik dalam mengelola keuangan desa. Adanya kompetensi yang baik maka pemerintah desa di Kabupaten Kudus telah bertanggungjawab dalam mengelola keuangan desa.

Kompetensi diukur dengan tiga indikator yakni adanya keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja. Semua indikator variabel kompetensi tersebut hasil analisis deskriptif termasuk dalam kriteria baik. Dengan demikian kompetensi memiliki peranan juga dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kudus.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keagenan (*agency theory*) oleh Jensen & Meckling (1976) dimana ada hubungan antara pemerintah desa sebagai agen dengan masyarakat sebagai *principal*. Masyarakat (*principal*) menginginkan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah desa (agen) memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sebagai alat pertanggungjawaban publik.

Dalam pemerintahan desa, perangkat desa diwajibkan untuk memiliki kompetensi berupa keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang memadai. Dengan kompetensi yang dimiliki pemerintah desa bertujuan supaya pelayanan pengelolaan keuangan desa bisa sesuai dengan peraturan desa yang ada.

Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Iskandar dan Setiyawati (2015) bahwa kompetensi akuntan internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Semakin baik kompetensi yang dimiliki oleh pengelola keuangan dalam mengelola keuangan pemerintah, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan akan semakin meningkat.

## SIMPULAN

Simpulan penelitian ini bahwa variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa baik secara simultan maupun parsial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aramide, S. F., Mustapha, &, & Bashir, M. (2015). *The Effectiveness of Internal Control System and Financial Accountability At Local Government Level in Nigeria. International Journal of Research in Business Management*, 3(8), 2321–2886.
- Fauziyah, M.R & Nur Handayani. (2017). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6.

- Hanifah, F. F. & Kiswanto. (2017). *The Effect of Political Competition, HDI, and Leverage on The Availability and Accessibility of Local Financial Information on The Website. Accounting Analysis Journal, 2*, 242–252.
- Iskandar, D & Hari Setiyawati. *The Effect of Internal Accountants' Competence on the Quality of Financial Reporting and the Impact on the Financial Accountability. International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR), 3(5)*, 55-64.
- Nugraha, D. S. (2011). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Aset Tetap Pemerintah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Cimahi). *Sigma-Mu, 3*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Pasal 29 Tahun 2015 tentang Pembagian Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.
- Riyansa,R & Yunilma, F. P. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Akuntansi 'Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wahyuni, P. S., Luh, N.G.E.S., Erni, G., & Trisna, N. (2014). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah( Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Badung ) Jurusan Akuntansi Program S1, 2(1).
- Wahyuningsih, P. & Kiswanto. (2016). *Factors Affecting The Accountability of Village Financial Management. Accounting Analysis Journal, 3*, 139–146.
- Wiyana, A., & Syah, S. (2016). *Accessibility Determinant And The Presentation Of Regional Financial Statement Towards The Accountability Of Regional Financial Management. Qualitative and Quantitative Research Review, 1(3)*, 29–46.
- Yusrianti,H. Ahmad S., Ika S.F., Fahrul A.. (2013). *The Effect of Regional Balance Sheet Disclosure and Accessibility Financial Statement on The Accountability of Regional Financial Management in Palembang City*.